

**ANALISIS PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA PADA KANTOR BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)
PROV. SUL - SEL TAHUN 2016 – 2017**

SKRIPSI



Oleh
ELYANG
10572 05552 15

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Teristimewa untuk kedua orang tua yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung ataupun memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan. Serta teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.



Jangan jadikan kekurangan sebagai keterpurukan hidup akan tetapi jadikan kekuranganmu sebagai alat untuk meraih kesuksesanmu, karna disetiap kekurangan terdapat berjuta juta kelebihan, dan harus tetap disyukuri atas segala kekurangan maupun kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul-Sel Tahun 2016-2017
Nama Mahasiswa : Elyang
No Stambuk/NIM : 105720555215
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

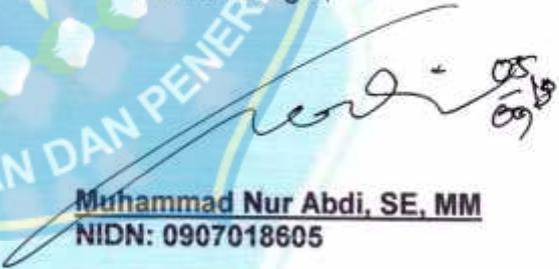
Makassar, 30 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

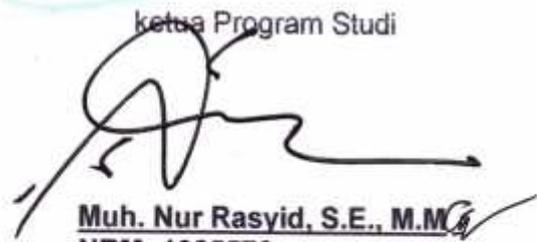
Pembimbing II,


Dra. Hj. Lilly Ibrahim, M.Si
NIDN: 0029114904


Muhammad Nur Abdi, SE, MM
NIDN: 0907018605

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi
Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 003078


Ketua Program Studi
Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M
NBM: 1085576



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama ELYANG Nim : 105720555215, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0011/SK-Y/61201/091004/2019 M, Tanggal 29 Dzulhijjah 1440 H/ 30 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulhijjah 1440 H
Makassar, _____

30 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E., M.M (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, S.E., M.M (.....) (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji
 1. Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, S.E., M.M (.....)
 2. Ismail Rasulong, S.E., M.M (.....)
 3. Faidul Adziem, S.E., M.Si (.....)
 4. Muhammad Nur Abdi, S.E., M.M (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar


Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 903078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elyang
Stambuk : 105720555215
Program Studi : Manajemen
Dengan Judul : "Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul-Sel Tahun 2016-2017"

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar. Dan telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019

Makassar, 30 Agustus 2019

Yang membuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL

ABDE0AFF778304172

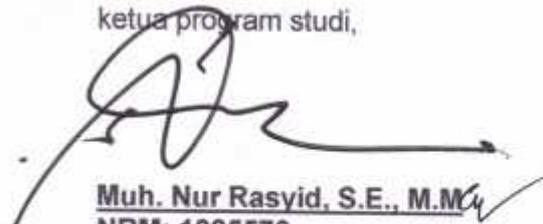
6000
EKUWEN
Rp. 91


Elyang

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

ketua program studi,



Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M
NBM: 1085576

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul – Sel tahun 2016 - 2017”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Sulaiman dan ibu Sulhayati yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudarku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M., selaku ketua program studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Lilly Ibrahim, M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Muhammad Nur Abdi, SE, MM., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi manajemen angkatan 2015 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makasaar, 2019

penulis

ABSTRAK

ELYANG, 2019. Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul – Sel tahun 2016 - 2017, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Hj. Lilly Ibrahim, dan Pembimbing II Muhammad Nur Abdi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan anggaran dengan efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sampai dengan 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diolah adalah ringkasan Rencana Kerja Anggaran dan Realisasi Anggaran pada badan pengelola keuangan daerah (BPKD) tahun 2016 sampai 2017 yang didapatkan dari laporan tahunan badan pengelola keuangan daerah. Teknik perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah menghitung rasio efektifitas dan rasio efisiensi realisasi anggaran badan pengelola keuangan daerah. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menghitung efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran badan pengelola keuangan daerah melalui hasil keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data perencanaan anggaran badan pengelola keuangan daerah berhasil menyusun dan merencanakan anggarannya dengan baik sampai tahap terealisasi, namun realisasi anggaran tersebut telah berjalan cukup efektif akan tetapi kurang efisien di tahun 2016 sampai dengan 2017, yang dikarenakan pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya.

Kata Kunci : *Perencanaan dan Realisasi Anggaran.*

ABSTRACT

ELYANG, 2019. Analysis of Planning and Realization of Revenue and Expenditure Budgets at the Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul - Sel in 2016 - 2017, Thesis of the Faculty of Economics and Business, Department of Management, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Hj. Lilly Ibrahim and Advisor II Muhammad Nur Abdi.

This study aims to determine the budget planning with the effectiveness and efficiency of the realization of the revenue and expenditure budget in the Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) of South Sulawesi Province 2016 to 2017. The type of research used is descriptive research with a quantitative approach. The data processed is a summary of the Budget Work Plan and Budget Realization at the Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) from 2016 to 2017 obtained from the annual report of the regional financial management body. The calculation technique used in the study is calculating the effectiveness ratio and efficiency ratio of Badan Pengelola Keuangan Daerah budget realization. While the data analysis technique used in the study was to calculate the effectiveness and efficiency of the realization of the Badan Pengelola Keuangan Daerah budget through the results of the overall income and expenditure budget. Based on the results of calculations and data collection on budget planning Badan Pengelola Keuangan Daerah managed to prepare and plan its budget well until the realization stage, but the realization of the budget has been running quite effectively but less efficiently in 2016 to 2017, which is due to spending greater than income.

Keywords: *Planning and Budget Realization*

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Anggaran.....	6
B. Perencanaan	17
C. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).....	23
D. Laporan Realisasi Anggaran.....	26
E. Penelitian Terdahulu.....	30
F. Kerangka Pikir	33
G. Hipotesis.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
C. Definisi Operasional.....	36
D. Populasi	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	41
B. Penyajian data (hasil penelitian)	52
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1	Rencana Kerja Anggaran 2016 - 2017	53
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Pendapatan 2016 - 2017	56
Tabel 4.3	Realisasi Anggaran Belanja 2016 - 2017.....	58



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKD.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks anggaran organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana-rencana tentang berapa biaya atas rencana yang dibuat dan seberapa besar cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Laporan keuangan menjadi produk akhir dari suatu proses akuntansi yang bertujuan menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan, baik bagi pihak Internal maupun Eksternal. Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar Laporan Realisasi Anggaran memberikan Informasi Realisasi serta anggarannya.

Menghadapi tekanan untuk efisien harus mampu memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Setiap organisasi pemerintahan pasti menginginkan tujuannya tercapai secara efektif serta efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD), terlebih lagi dalam situasi globalisasi seperti masa sekarang ini, untuk itu pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permendagri No. 56 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam Kerangka Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah. Salah satunya Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan/instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan/ instansi.

Manajemen suatu organisasi, baik yang berorientasi laba maupun non laba, akan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan untuk masa mendatang. Baik buruknya keputusan yang diambil tergantung dari informasi yang digunakan untuk kemampuan manajemen dalam menganalisis serta menginterpretasikan. Salah satu sumber informasi penting yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan tersebut, terutama keputusan keuangan adalah laporan keuangan.

Laporan keuangan yang menyajikan informasi sangat dibutuhkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah sebagai aparat yang dipercaya oleh masyarakat dalam mengelola keuangan negara dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam mengelola keuangan negara dan rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya guna mencapai *Good Government Governance*, dicerminkan dengan adanya akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan.

Perencanaan menjadi faktor yang mempengaruhi Realisasi anggaran karena masih adanya anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan riil di lapangan dan kemudahan dalam implementasinya. Pada dasarnya Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah

dalam melaporkan semua kegiatan keuangannya. Laporan itu berguna untuk mengetahui seberapa besar realisasi terhadap anggaran APBN yang telah ditetapkan sebelumnya.

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif serta efisien. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan anggaran sektor swasta karena tidak berhubungan dengan pengalokasian dana dari masyarakat. Pada sektor publik pendanaan organisasi berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik daerah atau negara.

Dalam melaksanakan anggaran dan menilai sendiri tentang pencapaian anggaran yang telah ditetapkan maka semakin baik kinerjanya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja *output* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang akan mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali

pembayaran oleh pemerintah. Saat perekonomian sedang lesu dan sektor privat tidak mampu berjalan dengan semestinya, belanja pemerintah digunakan sebagai penggenjot perekonomian secara agregat. Belanja pemerintah tersebut tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Belanja juga merupakan semua pengeluaran dan rekening kas umum Negara/Daerah yang akan mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah, secara normative. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) merupakan unsur pelaksanaan pemerintah Daerah pada bagian keuangan yang bertugas untuk melakukan penegelola keuangan di daerah Sulawesi selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan laporan Akhir dengan mengambil judul :

“Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul – Sel tahun 2016 - 2017”.

B. Rumusan Masalah

“Apakah perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 – 2017 sudah efektif dan efisien”

C. Tujuan Penelitian.

“Untuk mengetahui perencanaan anggaran dengan efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 – 2017”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

merupakan tambahan pengetahuan mengenai hal – hal penting menyangkut perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 – 2017, serta merupakan syarat dalam menempuh ujian Skripsi di Universitas Muhammadiyah Makassar.

b. Bagi Instansi

Dapat menjadi bahan informasi dan sebagai tambahan bahan referensi juga perbaikan kinerja keuangan pada badan pengelola keuangan daerah dimasa yang akan datang.

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam dunia ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan (SDM) khususnya tentang perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 – 2017

2. Manfaat Teoritis

Dapat melakukan perbandingan antara teori yang penulis peroleh dari buku maupun dari perkuliahan dengan aplikasinya di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Anggaran (*Budgeting*) merupakan alat perencanaan, pedoman, pengendalian dan alat pengawasan dibidang keuangan yang digunakan oleh perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non – laba. Dengan menggunakan anggaran maka perkembangan perusahaan / instansi akan dapat dipelajari dengan teliti dan berkesinambungan. Anggaran dapat berjalan dengan baik apabila dalam organisasi perusahaan / instansi tersebut ada dukungan aktif, baik dari pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah. Hal ini menyangkut kepada manusia, khususnya pada karyawan yang ada pada suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk memahami anggaran, maka pada bab ini akan dibahas mengenai teori yang berhubungan dengan anggaran.

Untuk lebih memahami pengertian anggaran beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Munandar (2014:1) Anggaran yaitu;

“Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang”.

Gunawan Adisaputro (2014:02) mendefinisikan *Budget* adalah;

“Suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan kordinasi dan pengawasan”.

Deddi Nordiawan, dkk (2013:19) yang dimaksudkan dengan *budget* (Anggaran) adalah :

“Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang terbatas”

Menurut Nafarin (2013:11), mendefinisikan bahwa;

“Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa”.

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa secara umum anggaran merupakan suatu bentuk rencana aktivitas suatu kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu periode mendatang yang secara umum dinyatakan secara kuantitatif berdasarkan angka-angka yang dibuat dengan pertimbangan yang komprehensif.

2. Tujuan Anggaran

Pada dasarnya bahwa tujuan pokok anggaran adalah memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta nonfinansial di masa yang akan datang, dan mengembangkan setiap informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran.

Tujuan penyusunan anggaran menurut Nafarin (2013:19), antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan.

- c. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
- d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
- f. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

3. Fungsi Anggaran dan Karakteristik Anggaran

a) Fungsi anggaran

Menurut Munandar (2014:10), fungsi anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu :

1) Sebagai pedoman kerja

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang.

2) Sebagai alat pengkoordinasian kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kesasaran yang telah ditetapkan.

3) Sebagai alat pengawasan kerja

Anggaran berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembandingan untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti.

Dengan membandingkan apa yang tertuang didalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah telah sukses bekerja atau kurang.

Di lain pihak menurut Mulyadi (2013:502), fungsi anggaran terdiri dari enam *item* yaitu :

- a) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses rencana kerja
- b) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan dimasa yang akan datang.
- c) Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang berhubungan yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer atas dan manajer bawah.
- d) Anggaran berfungsi sebagai alat tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.
- e) Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
- f) Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (2016:8) paragraf 13 menyebutkan bahwa fungsi Anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain Yaitu:

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah.
- e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggung jawaban pemerintah kepada publik.

Dari pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran berhubungan erat dengan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

b) karakteristik Anggaran

Mulyadi (2013:490), mengatakan bahwa karakteristik dari anggaran sebagai berikut :

- 1) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.
- 2) Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.
- 3) Anggaran berisi komitmen atas kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran.
- 4) Usulan anggaran yang telah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.

- 5) Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
- 6) Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Menurut Robert dan Vijay (2013:73) anggaran memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut :

- a) Anggaran mengestimasi potensi laba dari unit bisnis tersebut.
- b) Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah nonmoneter.
- c) Biasanya meliputi waktu selama satu tahun
- d) Merupakan komitmen manajemen; menejer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan - tujuan anggaran.
- e) Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran.
- f) Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi-kondisi tertentu.
- g) Secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varians dianalisis serta dijelaskan.

4. Faktor Dan Pertimbangan Dalam Anggaran

Nafarin (2013:11), menegaskan bahwa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran adalah sebagai berikut :

- a) Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan.
- b) Data waktu lalu.

- c) Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
- d) Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak - gerak pesaing.
- e) Penelitian untuk pengembangan perusahaan.

Nafarin (2013:11), mengatakan bahwa dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran dengan cara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Anggaran harus dibuat serealitas mungkin, secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah, tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan - angan.
- 2) Untuk memotivasi manajer pelaksana diperlukan partisipasi *top* manajemen (direksi).
- 3) Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi termotivasi.
- 4) Untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih dini.

Nafarin (2013:12), juga menyatakan bahwa anggaran yang dibuat juga akan mengalami kegagalan bila tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembuatan anggaran yang tidak cakap, tidak mampu berfikir ke depan.
- b. Kekuasaan membuat anggaran tidak tegas.
- c. Pelaksana tidak cakap.

d. Tidak didukung oleh masyarakat.

e. Dana tidak cukup.

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menyusun anggaran sangat perlu memperhatikan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran, perilaku para pelaksana dan hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan pada anggaran yang telah dibuat.

5. Kelemahan Anggaran

Menurut Munandar (2014:13), menjelaskan bahwa anggaran memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

a. Anggaran disusun berdasarkan taksiran-taksiran (*forecasting*).

Betapapun cermatnya taksiran tersebut dibuat, namun amatlah sulit untuk mendapatkan taksiran yang benar-benar akurat sama sekali tidak berbeda dengan kenyataannya nanti.

b. Taksiran-taksiran dalam anggaran disusun dengan mempertimbangkan berbagai data, informasi dan faktor-faktor, baik yang *controllable* maupun *uncontrollable*. Dengan demikian, jika nantinya perubahan-perubahan terhadap data, informasi serta faktor-faktor tersebut, akan berubah pula ketetapan taksiran-taksiran yang telah disusun tersebut.

c. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan realisasi anggaran sangat tergantung pada manusia pelaksananya. Anggaran yang baik tidak akan bisa direalisasikan bilamana pelaksananya tidak mempunyai keterampilan serta kecakupan yang memadai.

Sedangkan menurut Sofyan (2015:22), kelemahan anggaran antara lain :

1) Anggaran hanya merupakan rencana yang belum pasti tercapai.

- 2) Anggaran tidak bisa bekerja secara otomatis.
- 3) Anggaran harus terus-menerus dipantau dan disesuaikan bila perlu.
- 4) Anggaran masih memerlukan pertimbangan - pertimbangan rasional dari pimpinan.

Dari penjelasan diatas kita harus menyadari bahwa anggaran juga memiliki kelemahan - kelemahan. Ini sangat menuntut kita untuk selalu teliti dalam menyusun anggaran dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian yang berlangsung.

6. Jenis - Jenis Anggaran

Menurut Nafarin (2013:31), anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang sebagai berikut,

a. Dilihat dari segi dasar penyusunan, anggaran terdiri dari :

- 1) Anggaran variabel (*variable budget*), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.
- 2) Anggaran tetap (*fixed budget*), yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu.

b. Dilihat dari segi cara penyusunan, anggaran terdiri dari :

- 1) Anggaran periodik (*periodic budget*) adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.

2) Anggaran kontinu (*continuous budget*) adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan.

c. Dilihat dari segi jangka waktu, anggaran terdiri dari :

1) Anggaran jangka pendek (*short-range budget*) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun.

2) Anggaran jangka panjang (*long-range budget*) adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

d. Dilihat dari segi bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran induk (*master budget*).

1) Anggaran operasional (*operasional budget*) adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari :

- a) Anggaran penjualan
- b) Anggaran biaya pabrik
- c) Anggaran biaya bahan baku
- d) Anggaran biaya tenaga kerja langsung
- e) Anggaran biaya overhead pabrik
- f) Anggaran beban usaha

2) Anggaran keuangan (*financial budget*) adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan terdiri dari :

- a) Anggaran kas
 - b) Anggaran piutang
 - c) Anggaran persediaan
 - d) Anggaran utang
 - e) Anggaran neraca
- e. Dilihat dari segi kemampuan menyusun, anggaran terdiri dari :
- 1) Anggaran komprehensif (*comprehensive budget*) adalah rangkaian dari berbagai jenis anggaran yang disusun secara lengkap
 - 2) Anggaran parsial (*partially budget*) adalah anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja.
- f. Dilihat dari segi fungsinya, anggaran terdiri dari :
- 1) Anggaran tertentu (*appropriation budget*) adalah anggaran yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.
 - 2) Anggaran kinerja (*performance budget*) adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi (perusahaan), misalnya untuk menilai apakah biaya (beban) yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

7. Revisi Anggaran

Robert dan Vijay (2013:85) ada dua jenis revisi anggaran yaitu sebagai berikut :

- a. Prosedur yang memungkinkan pemuktahiran anggaran secara sistematis.
- b. Prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu.

Revisi anggaran harus dibatasi keadaan-keadaan dimana anggaran yang disetujui sedemikian tidak realistisnya sehingga tidak lagi menjadi alat pengendalian yang berguna. Revisi anggaran harus dijustifikasi berdasarkan perubahan kondisi yang signifikan dari yang ada ketika anggaran yang asli disetujui.

Revisi atau Perubahan APBD merupakan penyesuaian capaian target kinerja atau perkiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Alasan perubahan APBD yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- 4) Keadaan darurat, dan Keadaan luar biasa.

B. Perencanaan

1. Pengertian perencanaan

Menurut Nugroho dan wrihatnolo (2014) adalah

“Perencanaan dalam arti luas merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian. Perencanaan yang ideal adalah langkah – langkah yang

dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Perencanaan dalam arti sempit merupakan *derivate* dari kemampuan *foresight* yaitu kemampuan mengukur (*measuring*). Inti dari perencanaan ideal adalah mengukur”.

Samodra wibawa (2014) perencanaan adalah

“Proses memilih sekumpulan kegiatan dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa”

Menurut anggarini dan puranto (2016) adalah

“Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”

Sistem perencanaan pembangunan dalam undang – undang mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan meliputi;

- a. Pendekatan politik
- b. Pendekatan teknokratik
- c. Pendekatan partisipatif
- d. Pendekatan *top-down*
- e. Pendekatan *bottom-up*

2. Aspek Perencanaan

Menurut bhisma. M., et.al (2013), alam membahas aspek perencanaan, ada tiga aspek pokok yang harus diperhatikan. Ketiga aspek yang dimaksud adalah hasil dari pekerjaan perencanaan (*outcome planning*), perangkat organisassi yang digunakan untuk melakukan pekerjaan perencanaan, serta proses atau langkah- langkah melakukan pekerjaan perencanaan.

Adapun uraian aspek ini adalah sebagai berikut;

a. Hasil dari pekerjaan perencanaan

Hasil dari pekerjaan perencanaan disebut dengan nama rencana yang dapat berbeda antara satu pekerjaan perencanaan dengan pekerjaan perencanaan lainnya.

b. Perangkat perencanaan

Adalah merupakan satuan organisasi yang ditugaskan dan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pekerjaan perencanaan.

c. Proses perencanaan

Adalah langkah – langkah yang harus dilaksanakan pada pekerja perencanaan.

2. Ruang Lingkup Perencanaan

Menurut Olsen dan Eadie dalam parmedi (2011), jika ditinjau dari ruang lingkup rencana yang dihasilkan, perencanaan dapat dibedakan empat macam yakni:

a) Perencanaan strategis

Adalah upaya yang disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi dan ensitas lainnya.

Pemerintah daerah menyelenggarakan perencanaan strategis bertujuan antara lain adalah;

- 1) Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi – strategi yang efektif
- 2) Memperjelas arah masa depan
- 3) Menciptakan prioritas

- 4) Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi dimasa depan
- 5) Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan
- 6) Menggunakan keleluasaan maksimum dalam bidang - bidang yang berada di bawah perencanaan

b) Perencanaan taktis

Disebut perencanaan taktis apabila rencana yang dihasilkan hanya mengandung uraian tentang kebijakan, tujuan, serta kegiatan jangka pendek saja. Perencanaan taktis mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan situasi dan kondisi.

c) Perencanaan menyeluruh

Disebut perencanaan menyeluruh apabila yang dihasilkan mengandung uraian yang bersifat menyeluruh, dalam arti mencakup seluruh aspek dan ruang lingkup berbagai kegiatan yang akan dilakukan

d) Perencanaan terpadu

Disebut perencanaan terpadu apabila rencana yang dihasilkan jelas menggambarkan keterpaduan antar kegiatan yang akan dilakukan dengan kegiatan yang telah ada.

3. Jenis Rencana

menurut Sofyan (2015:62) Rencana dibagi beberapa jenis:

a. Rencana umum (*strategic plan*)

Merupakan rencana umum organisasi, rencana umum yang ditetapkan pimpinan sebagai arah umum dari organisasi.

b. Tactical planning

Merupakan penjabaran dari strategi perusahaan yang sifatnya jangka pendek dan lebih khusus. Disini dilakukan dua tahap kegiatan:

- 1) Formulasi : perumusan strategi
- 2) Implementasi : pelaksanaan strategi

c. Operational planning

Operational planning Dibagi dalam bentuk rencana:

- 1) *Standing plan* berupa kebijaksanaan, standar kerja atau SOP (*standart operating procedures*)
- 2) *Single use plan* adalah rencana satu waktu dan satu proyek saja.

Rencana ini dibagi dua:

- a) Program
- b) Proyek yaitu penjabaran dari program

Menurut Gitosudarmo (2014:156) sebagai suatu perencanaan, di dalam anggaran terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Rencana

Rencana merupakan penentuan lebih dahulu tentang kegiatan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Alasan yang mendorong untuk menyusun rencana antara lain :

- a) Waktu yang akan datang penuh ketidakpastian.
- b) Waktu yang akan datang penuh dengan alternatif.
- c) Rencana sebagai pedoman alat koordinasi dan alat pengawasan.

2) Meliputi seluruh kegiatan perusahaan

Kegiatan-kegiatan dalam perusahaan mencakup kegiatan-kegiatan bidang produksi, pemasaran, keuangan, personalia, dan administrasi umum.

3) Dinyatakan dalam satuan moneter

Semua aktivitas yang akan dilaksanakan dinyatakan dalam satuan rupiah. Sebelum dinyatakan dalam satuan rupiah, pada setiap aktivitas diukur dengan satuan sendiri-sendiri.

4) Menyangkut waktu yang akan datang

Anggaran disusun dan berlaku untuk periode yang akan datang. Periode anggaran yang digunakan adalah jangka panjang dan jangka pendek. Rencana tahunan perusahaan harus disusun setiap tahun. Rencana bisa bersifat jangka Panjang, menengah, dan pendek.

Beberapa kegunaan rencana ini dapat dikemukakan sebagai berikut;

- a. Agar setiap orang mengetahui arah yang akan dicapainya
- b. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas – tugas yang akan dicapai
- c. Sebagai alat penting dalam melaksanakan pengawasan
- d. Sebagai alat terjemahan filosofi dan tujuan utama perusahaan
- e. Sebagai media untuk menilai prestasi perusahaan dan orang – orangnya baik dalam merumuskan tujuan maupun dalam mencapainya
- f. Dapat meningkatkan prestasi karyawan
- g. Kita dapat lebih *aware* terhadap prestasi yang terbaik

C. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Menurut Yani (2013:369), APBD merupakan:

“Rencana keuangan tahunan pemerinthan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah”

2. Asas Umum APBD

Menurut Yani (2013;369), dalam menyusun terdapat beberapa asas umum yang harus dijadikan pedoman, yaitu sebagai berikut:

- a. APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- b. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

- d. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.
- f. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- g. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

- h. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- j. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.
- k. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

3. Struktur APBD

Menurut Halim dan Iqbal (2014:85) Kebijakan penyusunan anggaran didasarkan pada struktur dari APBD yang terdiri atas :

a. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah meliputi semua uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, serta merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

b. Belanja daerah

Belanja daerah mencakup semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

c. Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan uang yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

D. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2013:71) Laporan Realisasi Anggaran merupakan “ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan”. Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terjadi menjadi dua, yakni;

a. Dari atas ke bawah (*Top-down*)

Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah:

- 1) perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut.
- 2) Metode pembagian semena-mena (*Arbitrary allocation method*) merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya Metode ini tidak berdasar

pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik.

3) Metode persentase penjualan (*Percentage of sales*) menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan persentase peningkatan penjualan di lapangan. Metode ini didasarkan pada dua hal, yaitu persentase penjualan dan sejumlah pengembalian yang diterima aktivitas periklanan dan promosi yang dilakukan.

4) Melihat pesaing (*Competitive parity*) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar.

5) Pengembalian investasi (*Return of investment*) merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya. Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari.

b. Dari bawah ke atas (*Bottom-up*)

Merupakan proses Penyusunan Anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi

strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni:

- 1) Metode tujuan dan tugas (*Objective and task method*) dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut.
- 2) Metode pengembalian berkala (*Payout planning*) Menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dari hasil penjualan, pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (*break even point*) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya akan dirasakan dalam jangka panjang.
- 3) Metode penghitungan kuantitatif (*Quantitative models*) menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam computer dengan teknis analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya.

2. Tujuan Dan Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2013:71) adalah;

a. Tujuan

Tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran adalah memberikan informasi Realisasi dan Anggaran Entitas Pelaporan. Perbandingan antara Anggaran dan Realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara Legislatif dan Eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat

Informasi ini berguna bagi para pengguna laporan dalam memperbaiki maupun mengetahui Informasi laporan Realisasi Anggaran dengan baik dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber- sumber daya ekonomi, Akuntabilitas dan ketaatan Entitas Laporan terhadap Anggaran dengan;

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam hal Efisiensi dan Efektivitas penggunaan anggaran.

3) Akun-Akun pada Laporan Realisasi Anggaran

- a) Pendapatan
- b) Belanja
- c) Transfer
- d) Surplus atau Defisit

e) Penerimaan Pembiayaan

f) Pengeluaran Pembiayaan

g) Pembiayaan Neto

E. Penelitian Terdahulu

(Tabel 2.1)

NO	Nama/Tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Jauhari / 2017	Pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran satuan kerja wilayah pembayaran KPPN bandung I dan KPPN bandung II	Metode kuantitatif	Perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap penyerapan anggaran satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II.
2	Manuel Pangkey Dan Sherly Pinatik / 2015	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.	Metode kuantitatif	Untuk tingkat efektivitas pada tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efektif dan tingkat efisiensi dari tahun 2010-2014 keseluruhannya tidak efisien.
3	Rukayah dkk / 2017	Analisis laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada kantor badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang	Metode kuantitatif	Efektivitas badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang tahun anggaran 2014 sampai dengan tahun 2016 dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efektivitasnya

				diperoleh sebesar 102% termasuk dalam kriteria sangat efektif
4	Siti basariyah /2017	Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) daerah propinsi sulawesi tengah. Hasil penelitiannya	Metode deskriptif	Tingkat dan kriteria efektivitas untuk pelaksanaan anggaran pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa daerah provinsi sulawesi tengah tahun 2011-2015 rata-rata secara keseluruhan terlaksana secara efektif,
5	Indra mahardika putra / 2017	Proses penyusunan anggaran pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten sleman Yogyakarta.	Metode deskriptif kuantitatif	Penyusunan anggaran pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten sleman telah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu peraturan menteri keuangan no 92 PMK.05.
6	Ramlah basri / 2013	Analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada bpm-pd provinsi sulawesi utara	Metode deskriptif	Proses penyusunan anggaran BPM-PD provinsi sulawesi utara telah berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no. 13 tahun 2006 dan no. 22 tahun 2011. Realisasi anggaran BPM-PD provinsi sulawesi utara tahun 2012 sebesar 95, 30 %.

7.	Riska korompot dan Agus T. Poputra / 2015	Analisis penyusunan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota kotamobagu tahun anggaran 2014	Metode deskriptif	Diperoleh DPPKAD kota kotamobagu telah melaksanakan proses penyusunan anggaran sesuai dengan permendagri no. 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, namun belum merampungkan proses penyusunan APBD dalam siklus anggaran daerah tetapi masih dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP).
8	Anastasia friska palilingan dkk (2015)	Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada dinas pendapatan kota manado.	Metode evaluasi	Kinerja pendapatan pemerintah kota manado dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan kota manado tahun 2009-2013 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan pendapatan dan PAD positif.
9	Ardon fridolin hongga dan ventje ilat (2014)	Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota bitung	Metode deskriptif kuantitatif	APBD pemerintah kota bitung terrealisasi dengan baik karna realisasi anggaran tidak melebihi target yang dianggarkan
10	Astria nur jannah dien dkk (2015)	Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor dinas pendapatan daerah kota bitung.	Metode deskriptif kuantitatif	Tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pad di dinas pendapatan kota bitung tahun anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat dan

				kriteria efisiensi anggaran belanja secara keseluruhan kurang efisien dikarenakan penggunaan anggaran belanja yang terlalu tinggi.
--	--	--	--	--

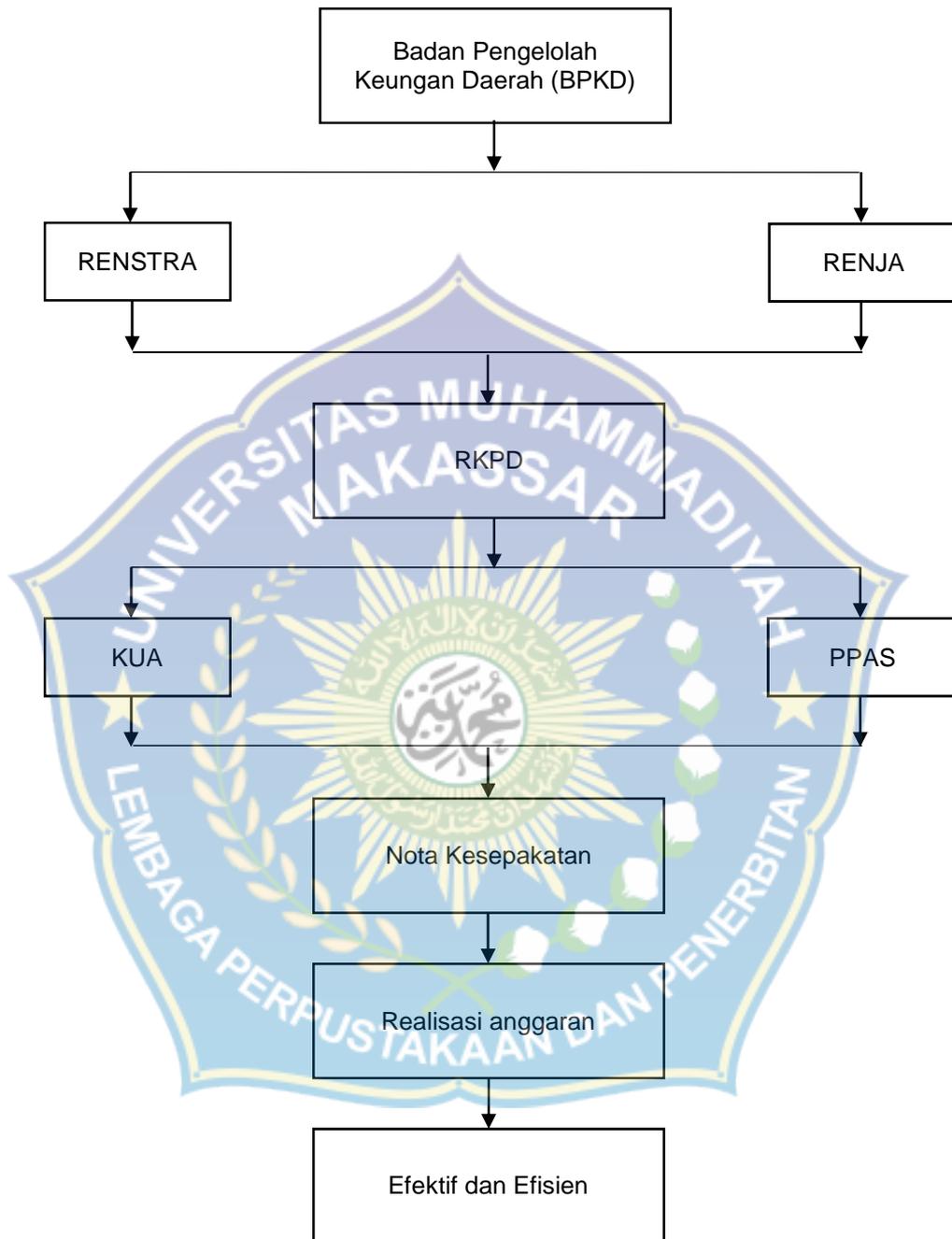
F. Kerangka Pikir.

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti yaitu Perencanaan anggaran dan realisasi anggaran dengan yang diharapkan atau mengalami surplus atau defisit. Sehingga dalam penelitian ini diperlukan suatu uji statistik untuk menguji dan menganalisis apakah benar-benar variabel tersebut mempunyai perbandingan yang signifikan terhadap anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul – Sel tahun 2016 - 2017.

Berdasarkan pada tinjauan pustaka sebelumnya, maka secara skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



(Gambar 2.1 Kerangka Pikir)



G. Hipotesis

“Diduga bahwa perencanaan anggaran dan realisasi anggaran tidak efektif dan efisien pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Prov. Sul – Sel tahun 2016 – 2017”.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) di Jalan Urip Sumohardjo No. 269, Makassar selama 2 bulan dimulai dari Mei 2019 – Juni 2019.

C. Definisi Operasional

Setiap penelitian yang dilakukan, memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu, objek yang diteliti harus mempunyai gambaran yang jelas agar tidak melenceng dari koridor penelitian yang akan dilakukan. Adapun batasan definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategi (RENSTRA) yang merupakan program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah yang hendak dicapai dalam kurung waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan

fungsi Lembaga / instansi yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan stratejik.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun berdasarkan RKPD tersebut Pemerintah Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk di bahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan
3. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD TA 2016 -2017 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara KDH dengan DPRD terhadap raperda tentang APBD.
4. Dengan adanya nota kesepakatan penyusunan perubahan APBD diperlukan kebijakan umum perubahan APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk menyusun suatu anggaran sampai dengan terealisasinya.
5. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut.
6. Efektif adalah target dalam batas waktu yang sudah ditetapkan tanpa sama sekali memperdulikan biaya yang sudah dikeluarkan. Sedangkan efisien adalah pencapaian target menggunakan input (biaya) yang sama untuk menghasilkan output (hasil) yang lebih besar.

D. Populasi

1. populasi

Adapun pengertian populasi menurut Sugiyono (2013:76) yaitu :

“Wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan”.

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran di badan pengelola keuangan daerah (BPKD) prov. Sul- sel pada tahun 2016 – 2017

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan serta keterangan berupa data dan informasi yang efektif, maka dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Observasi

Observasi yaitu, penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap badan pengelola keuangan daerah prov sul sel. yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data primer atau informasi mengenai keadaan sebenarnya, khususnya perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

2. Wawancara

Wawancara yaitu, mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan karyawan di badan pengelola keuangan daerah atau pihak-pihak yang bersangkutan mengenai masalah yang dibahas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, metode pengumpulan beberapa informasi yang berupa data tentang Perencanaan dan realisasi anggaran

pendapatan dan belanja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 – 2017.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Sugiyono (2010:147) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran pendapatan dengan total anggaran pendapatan (Mahsun : 2013)

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{anggaran}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas pendapatan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif

3. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja (Mahsun : 2013).

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{realisasi}}{\text{anggaran}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil pencapaian anantara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan/Lembaga

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanahkan pada pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menindaklanjuti peraturan pemerintah tersebut dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan produk dari peraturan daerah tersebut, yang sebelumnya bernama Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, mandat yang dulunya diemban oleh Biro Keuangan diintegrasikan ke dalam mandat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya bermuara pada lahirnya Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 85 huruf (a) dan pasal 85 huruf (b) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut

- a. Bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, mempunyai fungsi :
- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
 - b) Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
 - c) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan dan evaluasi APBD Kabupaten/Kota ;
 - d) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain menyelenggarakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .

Berdasarkan Pasal 85 huruf (c) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan membawahi 1 sekretaris dan 4 bidang.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Badan dan didukung oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan ;
- c. Kepala Sub Bagian Program;

3. Bidang - Bidang

Bidang – Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 4 Bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang dan masing-masing dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bidang yaitu :

- 1) Kepala Bidang Anggaran ;
 - a) Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD
 - b) Kepala Sub Bidang Otorisasi Dokumen Anggaran
- 2) Kepala Bidang Pembiayaan
 - a) Kepala Sub Bidang Pembiayaan I.
 - b) Kepala Sub Bidang Pembiayaan II
- 3) Kepala Bidang Akuntansi
 - a) Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi

b) Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan

4) Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

a) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota Wilayah I.

b) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah II.

Pada tahun 2017 susunan organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 seperti di bawah ini :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan membawahi 1 sekretaris dan 4 bidang.

2. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Badan dan didukung oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian terdiri dari :

- a. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan ;
- c. Kepala Sub Bagian Program;

3. Bidang - Bidang

Bidang – Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 4 Bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang dan masing-masing dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yaitu :

a. Kepala Bidang Anggaran ;

- 1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I
- 2) Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II
- 3) Kepala Sub Bidang Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah

b. Kepala Bidang Perbendaharaan

- 1) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Kas Daerah
- 2) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I
- 3) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II

c. Kepala Bidang Akuntansi

- 1) Kepala Sub Bidang Verifikasi
- 2) Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- 3) Kepala Sub Bidang Penanganan Tindak Lanjut dan Tuntutan Ganti Rugi

d. Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

- 1) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kab/Kota Wilayah I.
- 2) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah II.
- 3) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah III.

2. Visi dan Misi Organisasi

Visi dan misinya adalah sebagai berikut;

1. Visi

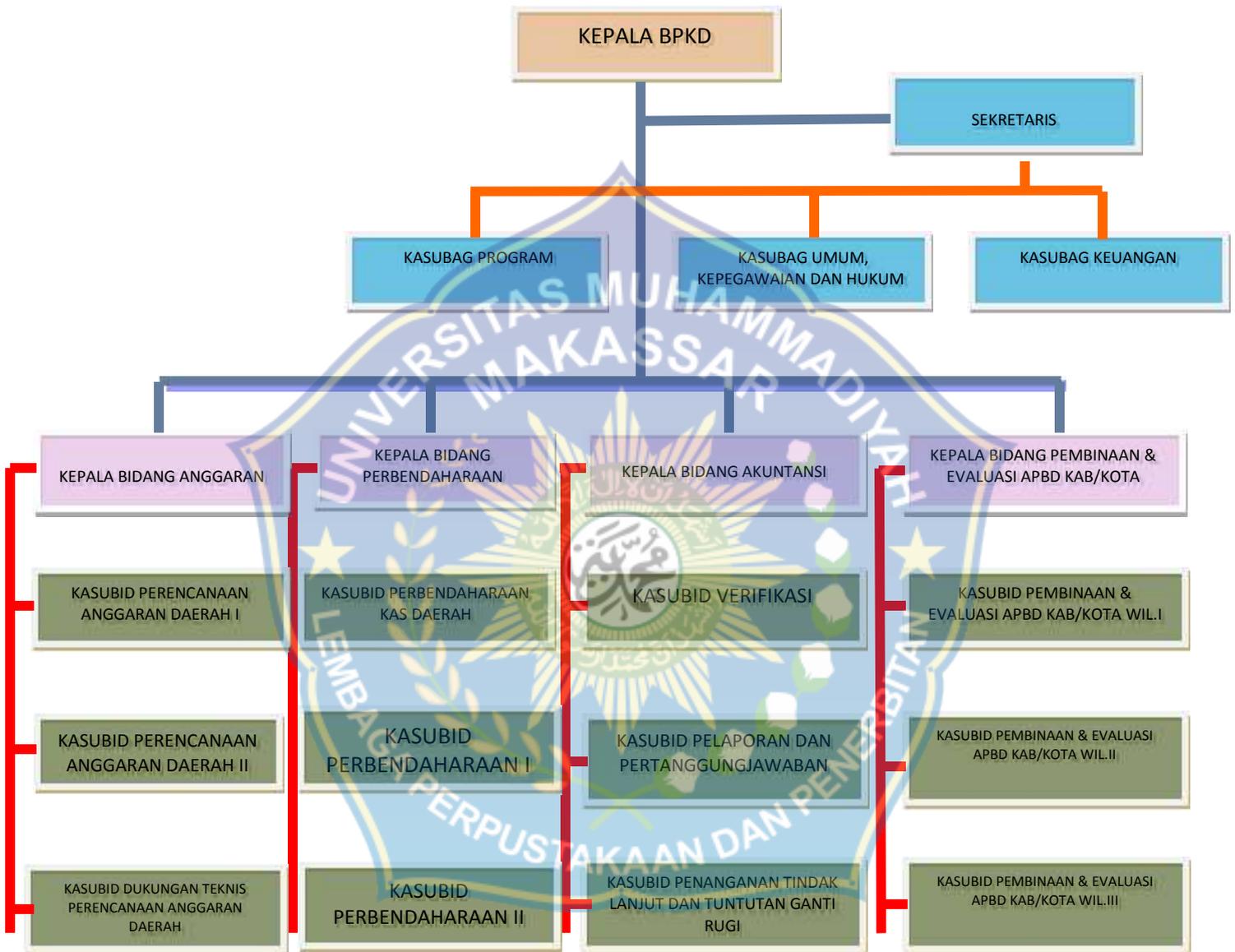
Menjadi pengelola keuangan daerah yang terpercaya dan membanggakan masyarakat Sulawesi Selatan, serta menjadi instrumen simpul jejaring akselerasi kesejahteraan pada tahun 2017

2. Misi

- a. Meningkatkan Kinerja Pelayanan dan Administrasi Perkantoran Dalam Lingkup BPKD Prov. Sulsel
- b. Meningkatkan Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan yang Berlaku
- c. Mendorong Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Daerah yang Tertib Administrasi sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan yang Berlaku
- d. Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan
- e. Meningkatkan Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

3. Struktur Organisasi dan Job Description

1) Struktur Organisasi



2) Job Description

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang

Keuangan yang menjadi kewenangan daerah. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas utama melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknik dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Bidang - Bidang

1. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan bidang anggaran meliputi perencanaan anggaran daerah I dan perencanaan anggaran daerah II serta dukungan teknis

perencanaan anggaran daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Anggaran;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Perbendaharaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Perbendaharaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan Bidang Perbendaharaan;

- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Perbendaharaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

3. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Akuntansi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Akuntansi; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.



B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD TA 2017 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara KDH dengan DPRD terhadap raperda tentang APBD, paling lambat tanggal 30 November 2016, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Tahapan dan jadwal penyusunan APBD sampai RKA adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan RKPD (akhir bulan mei)
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada Kepala Daerah (minggu 1 bulan juni)
3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah ke DPRD (pertengahan bulan juni)
4. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS (awal bulan juli)
5. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD (awal bulan agustus)
6. Penyusunan & pembahasan RKA-SKPD & RKA-PPKD serta penyusunan Ranperda APBD (awal bulan agustus s/d akhir bulan september)

1) Perencanaan Anggaran

Tabel 4.1 Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2016 - 2017

TAHUN	URAIAN	RENCANA	ANGGARAN
2016	Pendapatan	6.851.571.777.550,00	7.363.500.229.703,00
	1. Pendapatan asli daerah	3.511.644.271.550,00	3.516.797.239.983,00
	2. Pendapatan transfer	3.328.111.729.000,00	3.834.773.537.720,00
	3. Lain-lain pendapatan yang sah	11.815.777.000,00	11.929.452.000,00
	Belanja	5.101.581.929.754,77	5.871.116.828.091,15
	1. Belanja operasi	4.207.954.369.665,87	4.936.645.528.265,12
	2. Belanja modal	868.879.018.870,14	931.888.751.523,74
	3. Belanja tidak terduga	24.748.541.218,76	2.582.548.302,29
2017	Pendapatan	8.901.928.775.365,00	9.292.958.272.501,00
	1. Pendapatan asli daerah	3.724.172.762.535,00	3.743.344.520.531,00
	2. Pendapatan transfer	5.166.208.141.000,00	5.536.834.278.020,00
	3. Lain-lain pendapatan yang sah	11.547.871.830,00	12.779.473.950,00
	Belanja	7.675.846.477.028,22	7.751.147.856.087,96
	1. Belanja operasi	6.591.338.409.800,57	6.563.287.993.710,22
	2. Belanja modal	1.059.508.067.227,65	1.177.859.862.377,74
	3. Belanja tidak terduga	25.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Sumber: RKA Badan Pengelola Keuangan Daerah Sul-Sel 2016-2017

Pendapatan asli daerah pada tahun 2016 perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 3.511.644.271.550,00 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 0,14% sedangkan pada tahun 2017 pendapatan asli daerah perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 3.724.172.762.535,00 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 0,51%.

Pendapatan transfer pada tahun 2016 perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 3.328.111.729.000,00 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 5,22% sedangkan pada tahun 2017 pendapatan transfer perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 5.166.208.141.000,00 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 7,17%.

Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2016 perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 11.815.777.000,00 dan mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 0,96% sedangkan pada tahun 2017 Lain-lain pendapatan yang sah perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 11.547.871.830,00 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 0,66%.

Belanja operasi pada tahun 2016 perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 4.207.954.369.665,87 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 5,23% sedangkan pada tahun 2017 Belanja operasi perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 6.591.338.409.800,57 dan mengalami penurunan anggaran sebanyak 9,57%.

Belanja modal pada tahun 2016 perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 868.879.018.870,14 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 7,25% sedangkan pada tahun 2017 Belanja modal perencanaan yang dilakukan

sebesar Rp. 1.059.508.067.227,65 dan mengalami penurunan anggaran sebanyak 1,17%.

Belanja tidak terduga pada tahun 2016 perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 24.748.541.218,76 dan mengalami penurunan anggaran sebanyak 0,43% sedangkan pada tahun 2017 Belanja tidak terduga perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 dan mengalami penurunan anggaran sebanyak 0,4%.

2) Realisasi Anggaran

a) Rasio efektifitas

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas pendapatan sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

$$\text{rasio efektifitas} = \frac{\text{realisasi}}{\text{anggaran}} \times 100\%$$

$$T_{aun} 2016 = \frac{7.162.588.691.182,52}{7.363.500.229.703,00} \times 100\% = 97\%$$

$$T_{aun} 2017 = \frac{9.054.884.029.319,45}{9.292.958.272.501,00} \times 100\% = 97\%$$

Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2016 - 2017

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria efektif
2016	Pendapatan	7.363.500.229.703,00	7.162.588.691.182,52	97%
	1. Pendapatan asli daerah	3.516.797.239.983,00	3.449.561.308.104,52	98%
	2. Pendapatan transfer	3.834.773.537.720,00	3.704.816.673.661,00	96%
	3. Lain-lain pendapatan yang sah	11.929.452.000,00	8.210.709.417,00	68%
2017	Pendapatan	9.292.958.272.501,00	9.054.884.029.319,45	97%
	1. Pendapatan asli daerah	3.743.344.520.531,00	3.678.689.065.719,45	98%
	2. Pendapatan transfer	5.536.834.278.020,00	5.362.007.388.022,00	96%
	3. Lain-lain pendapatan yang sah	12.779.473.950,00	14.187.575.578,00	110%

Sumber: RAP Badan Pengelola Keuangan Daerah Sul-Sel 2016-2017

Hasil dari rasio efektifitas Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2016, Anggaran Pendapatan asli Daerah sebesar Rp. 3.516.797.239.983,00 dan Realisasi Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 3.449.561.308.104,52 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak. 98,08% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 98% dikategorikan cukup efektif. Dan anggaran pendapatan transfer sebesar Rp. 3.834.773.537.720,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 3.704.816.673.661,00 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 96,61% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 96% dikategorikan cukup efektif. Sedangkan anggaran Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 11.929.452.000,00 dan realisasi Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 8.210.709.417,00 Selisih antara anggaran

dan realisasi sebanyak 68,82% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebanyak 68% dikategorikan tidak efektif.

Hasil dari rasio efektifitas Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2017, Anggaran Pendapatan asli Daerah sebesar Rp. 3.743.344.520.531,00 dan Realisasi Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 3.678.689.065.719,45 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 98,27% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 98% dikategorikan cukup efektif. Dan anggaran pendapatan transfer sebesar Rp. 5.536.834.278.020,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 5.362.007.388.022,00 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 96,84% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 96% dikategorikan cukup efektif. Sedangkan anggaran Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 12.779.473.950,00 dan realisasi Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 14.187.575.578,00 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 111,01% dengan demikian diperoleh rasio efektifitas sebesar 110% dikategorikan sangat efektif.



Gambar 4.2 Rasio efektifitas Anggaran Pendapatan Tahun 2016-2017

b) Rasio Efisiensi

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil pencapaian anantara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi}}{\text{anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{5.522.839.080.544,57}{5.871.116.828.091,15} \times 100\% = 94\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{7.364.308.138.423,48}{7.751.147.856.087,96} \times 100\% = 95\%$$

Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2016 -2017

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Kriteria Efisien
2016	Belanja	5.871.116.828.091,15	5.522.839.080.544,57	94%
	1. Belanja operasi	4.936.645.528.265,12	4.665.776.837.576,02	94%
	2. Belanja modal	931.888.751.523,74	857.062.242.968,55	91%
	3. Belanja tidak terduga	2.582.548.302,29	Tidak terealisasi	
2017	Belanja	7.751.147.856.087,96	7.364.308.138.423,48	95%
	1. Belanja operasi	6.563.287.993.710,22	6.313.089.042.752,68	96%
	2. Belanja modal	1.177.859.862.377,74	1.051.187.330.670,80	89%
	3. Belanja tidak terduga	10.000.000.000,00	31.765.000,00	31%

Sumber: RAB Badan Pengelola Keuangan Daerah Sul-Sel 2016-2017

Hasil dari rasio efisiensi Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2016, Anggaran belanja operasi sebesar Rp. 4.936.645.528.265,12 dan Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 4.665.776.837.576,02 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 94,51%% dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebanyak 94% dikategorikan kurang efisien. Dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 931.888.751.523,74 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 857.062.242.968,55 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 91,97% dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebanyak 91% dikategorikan kurang efisien. Sedangkan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp. 2.582.548.302,29 dan anggaran tersebut tidak terealisasi

Hasil dari rasio efisiensi Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2017, Anggaran belanja operasi sebesar Rp. 6.563.287.993.710,22 dan Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 6.313.089.042.752,68 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 96,18%% dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebanyak 96% dikategorikan kurang efisien. Dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.177.859.862.377,74 dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 1.051.187.330.670,80 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 89,24% dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebanyak 89% dikategorikan cukup efisien. Sedangkan anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 31.765.000,00 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 0,31% dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebanyak 31% dikategorikan sangat efisien.



Gambar 4.3 Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2016-2017

C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)

Pendapatan pada tahun 2016 perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 6.851.571.777.550,00 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 7,47% sedangkan pada tahun 2017 pendapatan perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 8.901.928.775.365,00 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 4,39%.

Belanja pada tahun 2016 perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 5.101.581.929.754,77 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 5,08% sedangkan pada tahun 2017 Belanja perencanaan yang dilakukan sebesar Rp. 7.675.846.477.028,22 dan mengalami kenaikan anggaran sebanyak 0,98%.

Jika dilihat dari hasil analisis perencanaan anggaran pendapatan Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2016 – 2017 mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena selalu dilakukan peningkatan kapasitas SDM aparatur dan pemberdayaan SDM secara tepat dan kondusif dan dilakukan penertiban atau pemeriksaan dokumen pembayaran pajak secara optimal. Sedangkan hasil analisis perencanaan anggaran belanja Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2016 – 2017 mengalami kenaikan. hal ini disebabkan karena belanja pelaksanaan penggunaan anggaran pemerintah itu tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan contohnya peningkatan pelayanan Pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan penyediaan fasilitas sosial dan umum

Hasil dari rasio efektivitas Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2016, Anggaran Pendapatan sebesar Rp.

7.363.500.229.703,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 7.162.588.691.182,52 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 97,27% dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebanyak 97% dikategorikan cukup efektif. Karena sudah sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 dengan rasio efektifitas hasil pencapaian antara 90%-99%, sedangkan tahun 2017 Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 9.292.958.272.501,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 9.054.884.029.319,45 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 97,43% dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebanyak 97% dikategorikan cukup efektif. Karena sudah sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 dengan rasio efektifitas hasil pencapaian antara 90%-99%.

Hasil dari rasio efisiensi Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2016, Anggaran belanja sebesar Rp. 5.871.116.828.091,15 dan Realisasi belanja sebesar Rp. 5.522.839.080.544,57 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 94,06% dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebanyak 94% dikategorikan kurang efisien. Karena sudah sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 dengan rasio efisiensi hasil pencapaian antara 90%-100%, sedangkan tahun 2017 Anggaran belanja sebesar Rp. 7.751.147.856.087,96 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 7.364.308.138.423,48 Selisih antara anggaran dan realisasi sebanyak 95,00% dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebanyak 95% dikategorikan kurang efisien. Karena sudah sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 dengan rasio efisiensi hasil pencapaian antara 90%-100%,

Jika dilihat dari hasil efektifitas anggaran pendapatan Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2016 – 2017 dikategorikan cukup efektif. sedangkan hasil efisiensi anggaran belanja Badan Pengelola keuangan daerah (BPKD) Tahun Anggaran 2016 – 2017 dikategorikan kurang efisien dikarenakan pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya.

Meskipun ada anggaran yang tidak terealisasi pada tahun 2016 yang disebabkan karena tidak adanya kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, karena anggaran tidak terduga ini digunakan apabila ada keadaan darurat dan keperluan mendesak. Untuk anggaran yang tidak terealisasi akan dimasukkan ke Sisah Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan dianggarkan ke tahun berikutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja badan pengelola keuangan daerah rata rata mengalami peningkatan tahun anggaran 2016 – 2017, ini menunjukkan bahwa kantor BPKD berhasil menyusun dan merencanakan anggarannya dengan baik sampai tahap terealisasi.
2. Efektivitas Badan pengelola keuangan daerah Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2017 dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efektivitasnya diperoleh antara 90%-100% termasuk dalam Kriteria cukup Efektif. Hal ini berarti Pemerintah Badan pengelola keuangan daerah Sul – sel dikatakan berhasil Merealisasikan Pendapatan dengan Anggaran Pendapatannya. Efisiensi badan pengelola keuangan daerah sul - sel Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun 2017. Dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efisiensinya diperoleh antara 90%-100%, termasuk dalam Kriteria Kurang Efisien. Yang dikarenakan pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya. Hal ini berarti Pemerintah Badan pengelola keuangan daerah Sul – sel dikatakan Kurang berhasil dalam Merealisasikan Belanja dengan Anggaran Belanjanya.

B. Saran

1. Dalam penyusunan RKA-SKPD harus memperhatikan jenis, objek dan rincian objek belanja yang akan dibutuhkan dalam suatu kegiatan sehingga realisasinya dapat mencapai hasil yang diinginkan.

2. Setiap bulan atau paling lama 3 bulan dilakukan evaluasi program atau kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan sesuai dengan anggaran kas sehingga dapat mencapai realisasi sesuai target.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, Gunawan. 2014. *Anggaran Perusahaan*. Buku I. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Anggarini, Y dan puranto, B.H. 2016. *anggaran berbasis kinerja penyusunan APBD secara khomprenshif*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Bhisma, M.et.al. 2013. *perencanaan dan penganggaran untuk investasi kesehatan ditingkat kabupaten dan kota*. gadja mada press university. Yogyakarta
- Basariyah siti. 2017. *analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa (BPMPD) daerah propinsi sulawesi tengah*. e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 6, Juni 2017 hlm 63-74. ISSN: 2302-2019
- Basri Ramlah. 2013. *analisis penyusunan anggaran dan laporan realisasi anggaran pada bpm-pd provinsi sulawesi utara*. Jurnal EMBA. Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 202-212. ISSN 2303-1174
- Dien A. N. J.dkk .2015. *analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada kantor dinas pendapatan daerah kota bitung*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 534-541. ISSN 2303-1174.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2014. *manajemen pemasaran*. edisi ke 2. cetakan ke 3. BPFE. Yogyakarta
- Honga A. F. dan ventje I. 2014. *analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota bitung*. Jurnal EMBA. Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 278-288. ISSN 2303-1174
- Halim Abdul, Muhamad Iqbal. 2014. *Pengelolaan Keuangan Negara*. Penerbit Bulak Sumur. NPP STIM YKPN
- Jauhari (2017) *pengaruh perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap serapan anggaran satuan kerja wilayah pembayaran kppn bandung i dan kppn bandung ii*. Artikel jurnal. Bandung: Pascasarjana Universitass Pasundang Bandung
- Korompot R. dan Agus T. P. 2015. *analisis penyusunan anggaran pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota kotamobagu tahun anggaran 2014*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.841-848. ISSN 2303-1174
- Mahsun, 2013. *Metode penelitian Bahasa: tahapan, strategi, dan tekniknya*. Raja grafindo persada. Jakarta

- Munandar, M. 2014. *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. BPFE. Yogyakarta
- Mulyadi, 2013. *Akuntansi Manajemen*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Salemba Empat. Jakarta
- Nordiawan, Deddi, dkk. 2013. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta
- Nugroho, R. dan Randy R. Wrihatnolo, 2014, *manajemen perencanaan pembangunan*, PT. elex media kompulindo gramedia.
- Pangkey M. Dan Sherly P. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 33-43. ISSN 2303-1174
- Putra M. I. 2017. *proses penyusunan anggaran pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten sleman Yogyakarta*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 2, S1, September 2017: 271 – 280 P-ISSN 2527-7502 E-ISSN 2581-2165.
- Palilingan A. F. dkk. 2015. *analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (Ira) pada dinas pendapatan kota manado*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 17-25. ISSN 2303-1174
- Paramedy. 2011. *analisis penyusunan dan penetapan anggaran APBD dinas kesehatan kabupaten nunukan tahun 2011*. tesis diterbitkan UNHAS. makassar
- Permendagri No. 56 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- Peraturan pemerintah no. 71 tahun 2016 tentang standar akuntansi pemerintah
- Robert, A. dan Govindarajan, Vijay. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Rukayah dkk. 2017. *analisis laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada kantor badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang*. Jurnal Akuntansi. Vol 4 No. 2 Juli 2017. p-ISSN 2339-2436. e-ISSN 2549-5968
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta. Bandung

Syafri, Sofyan, Harahap. 2015. *Budgeting Perencanaan Lengkap*. PT. Gravindo Persada. Jakarta

Tanjung, A. H. 2013. *penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah*. Edisi 3. salemba empat. Jakarta.

Wibawa Samodra. 2014. *mengelola negara, pedoman untuk bupati, gubernur dan presiden*. gaya media. Yogyakarta.

Yani, Ahmad, S.H., M.M., AK. 2013. *hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*, edisi revisi, cetakan ke 5. PT. Gravindo Persada. Jakarta





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DOKUMENTASI PENELITIAN

Rencana Kerja Anggaran dan Realisasi Anggaran

LAMPIRAN I

: PERATURAN DAERAH
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TANGGAL : 24 Oktober 2016

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

Hal : 1

URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
2	3	4	5 = 4 - 3	6
PENDAPATAN DAERAH	6.851.671.777.550,00	7.358.707.400.703,00	507.135.623.153,00	7,40
Pendapatan asli daerah	3.511.644.271.550,00	3.516.797.239.983,00	5.152.968.433,00	0,14
Pajak daerah	3.145.435.142.000,00	3.145.435.142.000,00	-	-
Retribusi daerah	86.735.341.800,00	85.538.676.800,00	(1.196.665.000,00)	(1,37)
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	92.584.716.900,00	106.759.663.458,00	14.174.951.558,00	15,31
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	186.889.070.850,00	179.063.752.725,00	(7.825.318.125,00)	(4,18)
PENDAPATAN TRANSFER	3.328.111.729.000,00	3.829.980.708.720,00	501.868.979.720,00	15,07
Dana perimbangan	3.323.111.729.000,00	3.824.980.708.720,00	501.868.979.720,00	15,10
Dana Transfer Umum	1.675.940.659.000,00	1.665.639.734.720,00	(10.300.924.280,00)	(0,61)
Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	281.792.298.000,00	271.491.373.720,00	(10.300.924.280,00)	(3,65)
Dana alokasi umum	1.394.148.361.000,00	1.394.148.361.000,00	-	-
Dana Transfer Khusus	1.647.171.070.000,00	2.159.340.974.000,00	512.169.904.000,00	31,09
Dana Alokasi Khusus Fisik	425.077.470.000,00	443.199.954.000,00	18.122.484.000,00	4,26
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.222.093.600.000,00	1.716.141.020.000,00	494.047.420.000,00	40,42
Dana Insentif Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 7 Tahun 2017
 TANGGAL : 27 Oktober 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Hal : 1

mor rut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN DAERAH	8.901.928.775.365,00	9.281.774.031.580,00	379.845.256.215,00	4,26
1	Pendapatan asli daerah	3.724.172.762.535,00	3.743.344.520.531,00	19.171.757.996,00	0,51
.1	Pajak daerah	3.314.207.500.000,00	3.319.485.000.000,00	5.277.500.000,00	0,15
.2	Retribusi daerah	90.140.041.800,00	91.292.381.697,00	1.152.339.897,00	1,27
.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	122.029.115.890,00	127.005.896.497,00	4.976.720.607,00	4,07
.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	197.796.104.845,00	205.561.302.337,00	7.765.197.492,00	3,92
2	PENDAPATAN TRANSFER	5.166.208.141.000,00	5.525.650.037.099,00	359.441.896.099,00	6,95
.1	Dana perimbangan	5.158.708.141.000,00	5.518.150.037.099,00	359.441.896.099,00	6,96
1.1	Dana Transfer Umum	2.563.384.639.000,00	2.841.435.177.099,00	278.050.538.099,00	10,84
.1.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	297.120.039.000,00	331.954.922.099,00	34.834.883.099,00	11,72
.1.2	Dana alokasi umum	2.266.264.600.000,00	2.509.480.255.000,00	243.215.655.000,00	10,73
1.2	Dana Transfer Khusus	2.595.323.502.000,00	2.676.714.860.000,00	81.391.358.000,00	3,13
.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	337.189.000.000,00	418.580.358.000,00	81.391.358.000,00	24,13
.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2.258.134.502.000,00	2.258.134.502.000,00	-	-
2	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-	-

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 RINGKASAN REALISASI APBD
 TAHUN ANGGARAN 2016

Hal : 7

NO URUT	DAERAH	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.516.797.239.963,00	3.449.561.308.104,52	(67.235.931.876,48)	98,08
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.145.493.142.000,00	3.079.662.364.379,00	(65.772.777.621,00)	97,90
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	85.538.676.800,00	86.532.573.030,00	993.896.230,00	101,16
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	106.703.668.458,00	106.759.668.458,00	56.000,00	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	179.063.752.725,00	176.606.702.257,52	(2.457.050.467,48)	98,62
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.534.773.537.726,00	3.764.816.673.661,00	(229.956.864.059,00)	96,61
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	3.829.773.537.726,00	3.699.816.673.661,00	(129.956.864.059,00)	96,60
1211	Dana Bagi Hasil Pajak	330.827.467.200,00	331.803.624.775,00	976.157.575,00	100,43
1212	Dana Bagi Hasil Bahan Pajak (Gumut Daya Alam)	40.663.006.620,00	82.539.896.413,00	41.876.889.793,00	202,94
1213	Dana Alokasi Umum	1.294.348.261.000,00	1.294.348.261.000,00	0,00	100,00
1214	Dana Alokasi Khusus	2.164.133.803.000,00	1.991.324.789.475,00	(172.809.013.525,00)	92,01
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00
1221	Dana Otonomi Khusus	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00
1222	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	11.929.462.000,00	8.210.709.417,00	(3.718.752.583,00)	68,82
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	11.929.462.000,00	8.210.709.417,00	(3.718.752.583,00)	68,82
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PENDAPATAN	7.051.570.777.689,00	7.162.588.991.182,52	(200.911.538.526,48)	97,27
2	BELANJA DAERAH				
2.1	BELANJA OPERASI	4.936.645.538.265,12	4.665.776.637.570,02	(270.868.900.695,10)	94,51
2.1.1	Belanja Pegawai	1.290.926.158.650,05	1.139.625.324.679,00	(151.290.831.970,05)	88,32
2.1.2	Belanja Barang	1.511.351.066.058,10	1.295.721.017.436,91	(215.630.048.621,19)	85,73
2.1.3	Belanja Bunga	21.500.000.000,00	21.172.830.369,11	(327.169.630,89)	98,47
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	1.824.764.464.000,00	1.899.788.706.144,00	75.024.242.144,00	104,11

NO URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial				
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	772.102.839.556,37	365.467.553.567,00	(406.635.285.989,37)	47,32
2.2	BELANJA MODAL	931.808.751.923,74	857.062.242.968,85	(74.746.509.555,19)	91,97
2.2.1	Belanja Tanah	7.571.400.000,00	1.911.499.890,00	(5.659.901.110,00)	25,23
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	230.499.717.690,72	214.150.861.807,50	(16.348.855.883,22)	92,91
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	158.406.871.064,35	140.032.909.291,05	(18.373.961.773,30)	88,46
2.2.4	Belanja Jalan, Jembatan dan Jorong	524.738.143.154,87	463.627.436.601,00	(61.110.706.553,67)	88,37
2.2.5	Belanja Asst Tetap Lainnya	3.246.855.000,00	3.065.094.750,00	(181.760.250,00)	94,38
2.2.6	Belanja Asst Lainnya	3.142.543.000,00	2.979.621.000,00	(162.922.000,00)	94,83
2.2.7	Belanja BLUD	7.504.222.314,00	7.234.320.829,00	(269.901.485,00)	96,41
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.562.948.302,29		(2.562.948.302,29)	0,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.562.948.302,29		(2.562.948.302,29)	0,00
	JUMLAH BELANJA	5.873.116.828.091,15	5.522.839.080.544,87	(350.277.747.546,56)	94,06
2.4	TRANSFER				
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.424.438.407.400,00	1.408.139.587.843,86	(16.298.819.556,14)	98,85
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota				
	JUMLAH TRANSFER	1.424.438.407.400,00	1.408.139.587.843,86	(16.298.819.556,14)	98,85
	TOTAL BELANJA	7.295.255.235.491,15	6.930.978.668.388,43	(364.276.567.102,72)	95,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	67.944.994.211,85	231.610.022.794,09	163.665.028.582,24	346,87
3	PEMBAYARAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SLPA)	129.955.472.786,15	129.955.472.786,15		100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan Pinang Daerah				
3.1.7	Penerimaan Pembayaran ASKES				
3.1.8	Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga				
3.1.9	Penerimaan Pinang Pihak Ketiga				

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 RINGKASAN REALISASI APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Hal : 1

NO URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SEBELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	PENDAPATAN BILI DAERAH	3.743.344.320.831,00	3.678.688.068.718,45	(64.656.252.112,55)	98,27
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.319.485.000.000,00	3.241.745.321.290,00	(77.739.678.710,00)	97,63
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	91.290.381.897,00	82.751.765.275,20	(8.538.616.621,80)	90,69
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Eksploitasi Daerah yang Dipisahkan	177.005.836.497,00	127.005.994.838,83	(50.000.841.658,17)	71,75
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	205.563.395.537,00	227.884.764.315,42	22.321.368.778,42	110,76
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	8.838.834.278.020,00	8.582.007.348.022,00	(256.826.930.000,00)	97,19
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.538.344.278.020,00	5.334.507.388.022,00	(203.836.890.000,00)	96,32
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	287.596.214.000,00	241.132.527.160,00	(46.463.686.840,00)	83,86
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.158.000.000,00	36.394.800.200,00	32.236.800.200,00	875,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	2.300.400.000.000,00	2.596.480.355.000,00	296.080.355.000,00	112,87
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	3.862.699.370.020,00	2.565.500.202.640,00	(1.297.199.167.380,00)	66,42
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
1.2.2.1	Dana Penyetaraan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	12.773.473.930,00	14.187.575.578,00	1.414.101.648,00	111,01
1.3.1	Pendapatan Hibah	12.773.473.930,00	14.187.575.578,00	1.414.101.648,00	111,01
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat				
1.3.3	Pendapatan Lainnya				
	TOTAL PENDAPATAN	9.293.898.372.861,00	9.094.893.429.318,45	(198.999.343.542,55)	97,93
2	BELANGA DAERAH				
2.1	BELANGA OPERASI	6.563.287.893.710,22	6.313.089.042.782,68	(250.198.850.927,54)	96,18
2.1.1	Belanja Pegawai	3.047.121.555.116,83	2.982.113.863.769,00	(65.007.691.347,83)	97,87
2.1.2	Belanja Barang	1.800.468.304.000,00	1.724.208.449.811,00	(76.259.854.189,00)	95,76
2.1.3	Belanja Bunga	12.900.000.000,00	10.370.800.000,00	(2.529.200.000,00)	79,99
2.1.4	Belanja Subsidi				
2.1.5	Belanja Hibah	1.493.332.200.100,00	1.407.811.790.100,00	(85.520.409.000,00)	94,51

NO URUT	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	600.000.000,00	597.750.000,00	(2.250.000,00)	99,62
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	103.364.934.989,00	107.987.367.209,00	(5.577.547.279,00)	97,11
2.2	BELANJA MODAL	1.177.890.002.373,74	1.051.187.330.670,60	(126.672.531.706,94)	89,24
2.2.1	Belanja Tanah	840.400.000,00	772.096.860,00	(68.303.140,00)	91,98
2.2.2	Belanja Perawatan dan Pemeliharaan	204.419.312.738,41	231.236.063.376,81	(26.816.750.638,40)	113,16
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	550.336.789.296,00	509.233.425.985,00	(41.103.363.311,00)	92,53
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	259.756.230.661,31	236.446.425.106,06	(23.309.805.555,25)	91,02
2.2.5	Belanja Asst. Tetap Lainnya	66.719.608.714,00	60.025.480.869,00	(6.694.127.845,00)	91,31
2.2.6	Belanja Asst. Lainnya	6.462.300.000,00	7.824.978.560,00	(1.362.678.560,00)	121,08
2.2.7	Belanja BLUD	3.040.163.474,00	2.997.163.446,00	(43.000.028,00)	98,57
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	31.768.000,00	(9.968.235.000,00)	0,31
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	31.768.000,00	(9.968.235.000,00)	0,31
	JUMLAH BELANJA	7.751.147.806.687,96	7.364.306.138.425,48	(386.839.717.664,98)	95,00
2.4	TRANSFER				
2.4.1	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.574.812.251.109,28	1.536.772.252.432,00	(38.040.042.677,28)	97,59
2.4.2	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota				
2.4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota				
	JUMLAH TRANSFER	1.574.812.251.109,28	1.536.772.252.432,00	(38.040.042.677,28)	97,59
	TOTAL BELANJA	9.325.960.157.797,24	8.901.080.390.855,48	(424.879.766.941,76)	95,47
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.972.879.896,34)	183.803.636.463,97	183.803.636.463,97	(614,00)
3	PENYEDIAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SLPA)	165.802.879.896,24	165.802.879.896,24		100,00
3.1.2	Penerimaan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah				
3.1.6	Penerimaan Hibah Daerah				
3.1.7	Penerimaan Pembayaran ASKES				
3.1.8	Penerimaan Pembayaran Pihak Ketiga				
3.1.9	Penerimaan Hibah Pihak Ketiga				

LAMPIRAN 2

SURAT KETERANGAN MENELITI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 16252/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor: 1503/05/C.4-VIII/V/1440/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : ELYANG
Nomor Pokok : 105720555215
Program Studi : Manajemen
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Siti Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/jantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PERENCANAAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA KANTOR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD) PROVINSI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Mei s/d 20 Juni 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketelitian yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 17 Mei 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

07/5/2019

A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19810513-199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. Penitipgal.

LAMPIRAN 3

BIOGRAFI PENULIS



Elyang panggilan Iyan Lahir di Geddonge Pada Tanggal 18 april 1996 dari pasangan suami istri Bapak Sulaiman dan Ibu Sulhayati. Peneliti adalah anak tunggal. Peneliti sekarang bertempat tinggal di BTN Andi Tonro Permai Blok E1B No.11, kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa Kota Makassar.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 339 Lagosi Lulusan tahun 2008, SMP Negeri 4 Pammana Lulus Tahun 2011, SMA Negeri 9 Wajo lulus tahun 2014 dan Mulai tahun 2015 mengikuti program S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.

